

Bagian Pertama:

**PENDEKATAN
EKONOMI POLITIK
INTERNASIONAL**

BAB I

Memahami Ekonomi Politik Internasional

A. Pendahuluan

Negara dan pasar dalam perkembangannya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ekonomi adalah hal yang erat kaitannya dengan pencapaian kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam level internasional, negara dan pasar adalah inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005).

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah "*branch of science of a statesman or legislator*" dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Sedangkan menurut Mochtar Mas'oeed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi

antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas'ood, 2008). Fokus bahasan EPI terletak pada interaksi pasar dan aktor-aktor politik di dalamnya. Studi ekonomi tidak cukup untuk menjelaskan isu-isu vital di dalam distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional, hingga dampak dari ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, serta keefektifan rezim-rezim internasional. Hal ini harus dilihat dari batas-batas politik negara, yang nantinya akan dapat menggambarkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya.

Dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya (Gilpin, 1987). Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerja sama antarnegara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional.

B. Telaah Kajian EPI

Studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) menurut Oatley (2006) adalah studi mengenai bagaimana

kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah. Ekonomi Politik Internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global yang fokus pada pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global. Bursa ekonomi global ini meningkatkan pendapatan beberapa orang dan juga menurunkan pendapatan yang lainnya, meminjam istilah Gilpin (2005) "Ekonomi Politik Global" merupakan interaksi pasar dan aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Konsekuensi distributif dari bursa ekonomi global ini adalah terjadinya kompetisi politik di tingkat nasional dan internasional di mana yang kuat mencari lebih banyak "hubungan" dalam ekonomi global untuk meningkatkan pendapatan mereka, sedangkan yang lemah mencoba menghilangkan batasan ekonomi di tingkat global dan nasional untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kerugian mereka. Ekonomi politik internasional mempelajari bagaimana pertarungan politik yang terjadi antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global membentuk evolusi ekonomi global. (Oatley, 2006)

Fokus sentral ekonomi politik internasional sebagai subjek akademik adalah bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah. Untuk memahami perkembangan dalam ekonomi global kita harus mengetahui teori-teori ekonomi, kebijakan-kebijakan domestik, menelaah dinamika interaksi politik

antarpemerintah dan mengenal organisasi-organisasi politik internasional. Secara umum, Oatley membagi empat isu sentral bidang kajian dalam EPI: (a) Sistem Perdagangan Internasional, (b) Sistem Moneter Internasional, (c) Perusahaan Multinasional (MNCs) dan (d) Pembangunan Ekonomi. Keempat isu tersebut saling terkait, di mana permasalahan-permasalahan perdagangan, MNC, dan sistem moneter internasional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi dapat dipelajari secara terpisah.

Para akademisi yang mempelajari sistem perdagangan internasional menelaah bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kreasi, operasi, dan konsekuensi dari sistem yang terpusat pada WTO tersebut dan kerangka perdagangan regional yang berlangsung. Para akademisi yang mempelajari sistem moneter internasional fokus terhadap bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kreasi, operasi, dan konsekuensi dari sistem ini, di mana sistem ini memberikan kebebasan transaksi ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di negara-negara berbeda. Lain halnya dengan para akademisi yang mempelajari perusahaan multinasional, fokusnya adalah bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dari aktivitas MNC membentuk upaya-upaya pemerintah dalam meregulasi aktivitas MNC. Mereka juga mempertanyakan kenapa suatu MNC bisa muncul dan memberikan dampak ekonomi terhadap *host country* di mana operasi MNC itu ditempatkan. Kemudian para

akademisi yang mempelajari pembangunan ekonomi akan fokus pada strategi spesifik yang diadopsi oleh pemerintahan negara-negara berkembang dan mencoba menjelaskan mengapa masing-masing pemerintahan mengadopsi strategi ekonomi yang berbeda. Mereka menekankan bagaimana pertarungan politik yang merupakan konsekuensi distributif dalam ekonomi global membentuk strategi pembangunan yang diadopsi oleh pemerintah.

Kebijakan ekonomi luar negeri yang diadopsi pemerintah baik dalam hal kebijakan perdagangan, kebijakan *exchange rate*, dan kebijakan terhadap MNC berdampak pada penggunaan sumber daya yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, studi Ekonomi Politik Internasional adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kebijakan negara dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka punya.

C. Perspektif Konvensional dalam EPI

Dalam studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) terdapat berbagai macam perspektif dalam memandang fenomena-fenomena yang terkait masalah politik dan ekonomi internasional. Beberapa perspektif yang sering digunakan sebagai pendekatan utama dalam kaitannya dengan studi EPI yaitu perspektif merkantilis, liberalis, dan marxis.

Perspektif merkantilisme merupakan bagian dari fase dalam sejarah kebijakan ekonomi, atau sebuah sistem

tentang kebijakan ekonomi yang banyak dipraktikkan oleh para negarawan Eropa dalam rangka menjamin kesatuan politik dan kekuatan nasionalnya. Kaum merkantilisme memiliki pandangan bahwa elite-elite politik berada pada garis depan pembangunan negara modern (Jackson & Sorensen, 2005). Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerja sama yang saling menguntungkan. Kekuatan ekonomi dan kekuatan politik sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara serta kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilisme menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus diutamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah sepanjang waktu.

Secara garis besar sifat pokok dari perspektif merkantilisme ini di antaranya menitikberatkan pada perdagangan antarnegara, hasrat untuk mencapai suatu kemakmuran, usaha untuk mengembangkan kekuasaan, serta hubungan yang erat antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. Ringkasnya, merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas

peningkatan kekuatan negara. Negara adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas.

Perspektif liberalisme didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang tidak suka berkonflik, mau bekerja sama, dan rasional (Gilpin, 1987). Berlandaskan asumsi dasar tersebut, pemikir liberal berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan manusia rasional akan menimbulkan interaksi yang harmonis di mana kebutuhan manusia akan terpenuhi secara efektif dan efisien dengan syarat dalam proses tersebut tidak ada pihak yang mengintervensi. Kaum liberal menganggap pasar sebagai mekanisme paling tepat dalam pemenuhan kebutuhan manusia karena di sanalah manusia bebas untuk berinteraksi (membeli dan menjual) atas inisiatif mereka sendiri. Mekanisme pasar akan membuat roda pemenuhan kebutuhan manusia akan terus berputar karena harga menunjukkan nilai kebutuhan sebuah barang (Gilpin, 1987). Terkait dengan permasalahan pasar, ada dua pendapat yang muncul dari para teoretikus liberalisme. Adam Smith menjelaskan tentang negara yang seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pasar, biasa disebut *invisible hand*, sedangkan Keynes mengemukakan

bahwa negara terkadang perlu masuk ke dalam pasar untuk menjaga keseimbangan pasar. (Mas'ood, 2008)

Perspektif Marxisme berkembang dari pemikiran filsuf ekonomi politik, Karl Marx. Salah satu teori yang mendasari kaum Marxis adalah dialektika materialisme, di mana secara umum, inti dari ajaran Marx adalah kritik terhadap kapitalisme. Marxis lebih menekankan fokusnya pada aspek ekonomi dan materi di mana mereka membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi (Caporaso & Levine, 1992). Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital) (Gilpin, 1987). Dalam pandangan kaum Marxis, kehidupan ekonomi berada pada urutan pertama, sedangkan politik di tempat kedua. Oleh karena itu, dalam kehidupan sebuah negara, kepentingan dan isu-isu ekonomi menjadi isu-isu yang penting dan sangat menentukan kepentingan yang ada dalam politik. Bahkan, politik sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi, dan negara bukanlah lembaga yang otonom bagi penganut Marxis. Demikian juga kelas-kelas sosial yang ada, borjuis dan proletar, akan menentukan kebijakan-kebijakan politik yang diambil sesuai dengan kepentingan kelas sosial yang berkuasa sehingga secara garis besar Marxis beranggapan bahwa perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antarkelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Hal itu berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis, kaum borjuis akan menjadi kelas yang paling berkuasa.